

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, PAD dan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model regresi PDRB memenuhi asumsi klasik dan menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 92,6 persen. Secara parsial terdapat variabel jumlah penduduk, PAD dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB.
2. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat, artinya semakin meningkat jumlah penduduk maka semakin meningkat pula PDRB.
3. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, artinya semakin meningkat PAD maka semakin meningkat pula PDRB.
4. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, artinya semakin meningkat pengeluaran pemerintah maka semakin meningkat pula PDRB.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan penelitian yang didapat, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

### a) Jumlah Penduduk

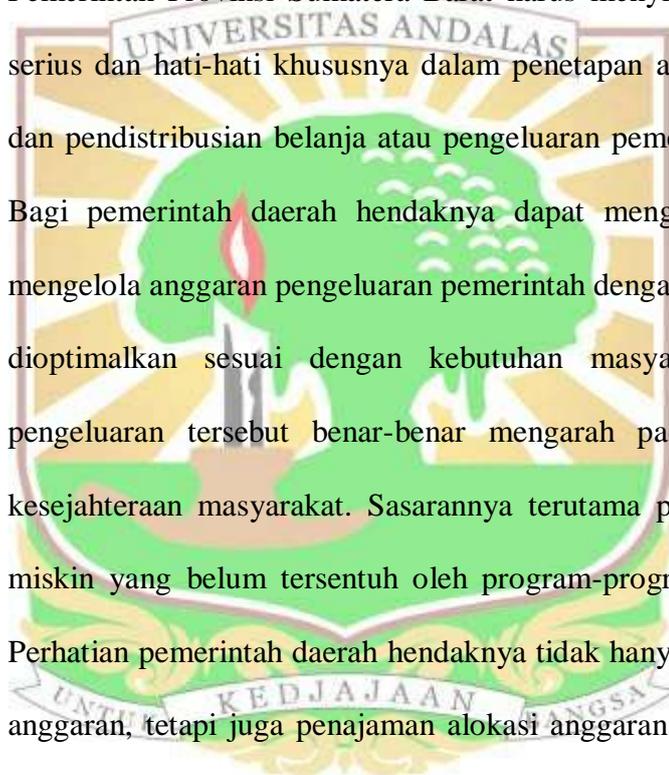
1. Pemerintah pusat maupun daerah harus tetap meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan berbasis padat karya dan meningkatkan pembangunan karena ternyata jumlah penduduk yang bekerja cukup besar di Propinsi Sumatera Barat dan memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB.
2. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dan memberikan latihan bagi tenaga kerja/ sumberdaya manusia yang ada di setiap daerah tersebut sehingga tetap mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian (PDRB) di daerah tersebut.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap memberikan perhatian terhadap pertumbuhan penduduk. Pemerintah harus terus konsisten dalam menjalankan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, efektif agar terbentuk keluarga yang berkualitas dan produktif.

b) PAD

1. Dari penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata telah efektif dan cukup efisien untuk di harapkan kepada pemerintah Sumatera Barat agar terus meningkatkan penerimaan pajak disamping itu Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak sehingga lebih efektif dan efisien.
2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas sumber-sumber PAD tersebut, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan segi sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak sebagai bentuk balas jasa atas tidak langsung yang di berikan atas pajak yang di bayarkan.
4. Penerimaan pajak daerah perlu di pertahankan konsistensinya dan ditingkatkan secara proposional sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada. Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua staholder yang ada didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada secara konsisten dan proposional.

c) Pengeluaran Pemerintah

1. Bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam hal ini BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) diharapkan lebih berhati-hati dalam penganggaran belanja operasional agar lebih efisien. Sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal seperti pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyikapinya dengan serius dan hati-hati khususnya dalam penetapan anggaran belanja dan pendistribusian belanja atau pengeluaran pemerintah tersebut. Bagi pemerintah daerah hendaknya dapat mengalokasikan dan mengelola anggaran pengeluaran pemerintah dengan lebih baik dan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pengeluaran tersebut benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya terutama pada masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah. Perhatian pemerintah daerah hendaknya tidak hanya meningkatkan anggaran, tetapi juga penajaman alokasi anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat desa karena manusia yang sehat juga turut menentukan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Pengalokasian anggaran pengeluaran pemberdayaan masyarakat desa hendaknya sesuai kebutuhan masyarakat dan bersifat inovatif, serta adanya *political*



*will* dan komitmen pemerintah terhadap alokasi pengeluaran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

